

DINAS KOMINFO SP. MURUNG RAYA

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Murung Raya Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, Murung Raya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kabupaten ;
- b. Pelaksanaan kegiatan telekomunikasi Statistik dan Persandian serta penyediaan sarana komunikasi dan diseminasi Informasi Publik ;
- c. Perumusan bahan kebijakan dan kebijakan teknis dibidang E-Government, dan TIK;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang teknologi informasi dan bidang telekomunikasi dan e-government;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan Anggaran Dinas ;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);

- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.1 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

2.1.1.1 Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika Statistik dan Persandian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kabupaten;
 - b) pelaksanaan kegiatan Informasi Publik, E-Government, telekomunikasi Statistik dan Persandian;
 - c) perumusan bahan kebijakan dan kebijakan teknis dibidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
 - d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - e) pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang teknologi informatika telekomunikasi Statistik dan Persandian;
 - f) pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - g) pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - h) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan Dinas.

1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b) penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
 - c) penyelenggaraan administrasi umum;
 - d) penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
 - e) penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f) pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Dinas;
 - g) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - h) pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - i) penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan asset dinas;
 - j) pengelolaan Keuangan Dinas;
 - k) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
 - l) pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
 - m) pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum di atas, Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan evaluasi serta pelaporan;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;
- j. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- k. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja Dinas;
- l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- m. pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- n. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
- o. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- p. penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- q. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
- r. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- s. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub. Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Info Publik dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Informasi Publik dan Pengendalian Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Informasi Publik dan Komunikasi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Informasi dan Data Komunikasi Publik mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. pelaksanaan desiminasi informasi publik nasional;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pengelolaan informasi publik pembangunan Kota Puruk Cahu;
 - d. pelaksanaan penyediaan, penyebaran informasi, dan koordinasi informasi pembangunan Kota Puruk Cahu;
 - e. pelaksanaan diseminasi informasi public melalui media cetak elektronik (Running Text, Radio, Televisi, Website dan Media Multimedia lainnya), papan informasi, majalah dinding, film, serta melalui media tradisional, dan kelompon informasi masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan diseminasi informasi publik;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian diseminasi informasi publik;
 - h. Penyusunan laporan, evaluasi dan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan diseminasi informasi publik;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Regulasi Undang-Undang Teknologi Informasi dan pengendalian informasi Media Publik;
 - j. Menyelenggarakan pengkajian dan fasilitasi pengumpulan , pengolahan, integrasi dan pengendalian data media dan informasi Publik.
 - k. Menyediakan Data dan Informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat;
 - l. Menyediakan data yang berkelanjutan dan relevan bagi pengguna

informasi:

- m. Menyediakan data guna perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi program-program;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :

- a. Seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik
- b. Seksi pengelolaan informasi publik
- c. Seksi pengelolaan media komunikasi publik

Seksi Data dan Aplikasi

- (1) Seksi Data dan Aplikasi mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pencarian, penghimpunan data dan pengembangan aplikasi teknologi informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Data dan Aplikasi mempunyai fungsi.
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi data dan aplikasi mengacu pada rencana kerja bidang Data dan Informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis data dan aplikasi dan fasilitasi pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi;
 - c. Pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan, dan penyusunan data , laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat yang bersifat terkini dan akurat;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi;

Seksi Pengendalian Informasi

- (1) Seksi Pengendalian Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengolahan dan pengendalian dibidang informasi media, komunikasi dan informatika;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengendalian Informasi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi pengendalian informasi mengacu pada rencana kerja bidang data dan informasi
 - b. Pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten, serta fasilitasi perkembangan informasi;
 - c. Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan dan evaluasi data dibidang pengendalian informasi, media, komunikasi dan informatika;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengendalian informasi, media komunikasi dan informatika;
 - e. Pelaksanaan Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi pengendalian informasi, media, komunikasi dan informatika
 - f. Menyusun dan Mengevaluasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data dan informasi;
 - g. Melakukan koordinasi, Konsolidasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi;
 - h. Melakukan pengolahan redaksi berita , desain, press release, basis data, laporan, kaledoskop, kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 - i. Melaksanakan Pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi;
 - j. Melaksanakan fasilitasi dokumentasi, pengarsipan data dan informasi;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang E-Government

- (1) Bidang e-government mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Infrastruktur Telematika dan aplikasi TIK.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang E-goverment mempunyai fungsi melaksanakan urusan Bidang TIK dan Aplikasi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang E-Government (Blue Print TIK) Pengembangan dan keamanan aplikasi mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan infrastruktur, aplikasi dan operasional ;
 - c. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang teknologi informatika;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengembangan infrastruktur, aplikasi dan operasional; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang E-Government , terdiri dari :

- a. Seksi infrastruktur teknologi dan tata kelola e-government
- b. Seksi pengembangan aplikasi
- c. Seksi keamanan informasi & telekomunikasi

Seksi Pengembangan infrastruktur Teknologi dan Tata kelola E-Gov

- (1) Seksi Pengembangan infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang pengembangan dan keamanan infrastruktur .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengembangan infrastruktur

dan operasional serta perawatan Teknologi Informasi;

- b. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur dan operasional dan perawatan teknologi informasi di lintas Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan nasional;
- c. Melaksanakan pengendalian terhadap pengembangan Infrastruktur dan operasional serta perawatan teknologi informasi yang telah terbangun;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur dan operasional serta perawatan teknologi informasi;
- e. Melaksanakan kebijakan strategi pengembangan infrastruktur jaringan dan data center;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan analisis pengembangan infrastruktur dan oprasional dan perawatan teknologi informasi;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan infrastruktur;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

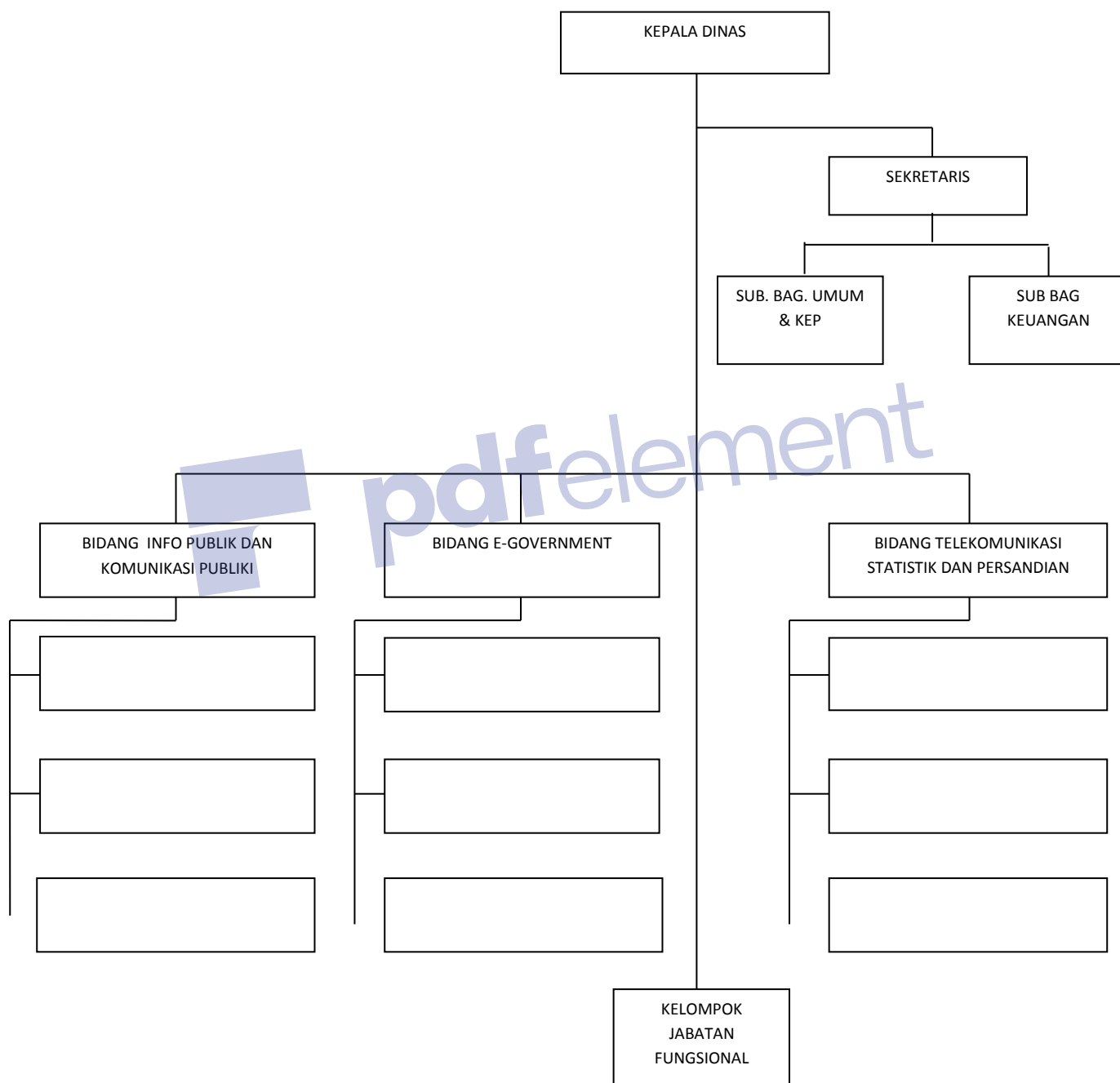
Seksi Keamanan Telekomunikasi

- (1) Seksi keamanan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keamanan telekomunikasi
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi keamanan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi keamanan dan Pengendalian TIK dan mengacu pada rencana strategis bidang;
 - b. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi TIK;

bidang informasi telekomunikasi statsitik dan persandian

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Murung Raya digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



2.2 Sumberdaya Dinas Komunikasi Informatika SP

Dinas Komunikasi Informatika Murung Raya dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 2 orang kepala Sub.bagian, 3 orang kepala bidang dan 3 orang kepala Seksi. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo (Ess IIb) dibantu oleh:

1. Sekretaris (Ess IIIa), yang membawahi 2 sub bagian (Ess IVa), yaitu :
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. 2 Kepala Bidang (Ess IIIb), yang masing-masing membawahi 3 seksi (Ess IVa), yaitu :
 - a) Kepala Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik, membawahi 3 seksi, yaitu :
 - Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
 - Seksi pengelolaan informasi publik
 - Seksi pengelolaan media komunikasi publik
 - b) Kepala Bidang E-Government, membawahi 3 sub seksi, yaitu :
 - Seksi infrastruktur teknologi dan tata kelola e-government
 - Seksi pengembangan aplikasi
 - Seksi keamanan informasi & telekomunikasi
 - c) Kepala Bidang Komunikasi Telekomunikasi Statistik dan Persandian, membawahi 3 sub seksi, yaitu :
 - Seksi infrastruktur telekomunikasi & persandian
 - Seksi layanan informasi dan kehumasan
 - Seksi pengelolaan data & statistik

3. Pelaksana

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika SP Kabupaten Murung Raya saat ini sebanyak 15 orang, terdiri dari 7 laki-laki dan 8 perempuan. Dari sejumlah 29 pegawai tersebut, 12 orang berstatus PNS dan, 17 orang bersatatus Honorer, dan jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

2) Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

- a. Golongan IV/a : 1 orang
- b. Golongan IV/b : 1 orang
- c. Golongan IV/c : - orang
- d. Golongan III/d : 5 orang
- e. Golongan III/c : 2 orang
- f. Golongan III/b : 1 orang
- g. Golongan III/a : 1 orang
- h. Golongan II/d : 3 orang
- i. Golongan II/c : 1 orang
- j. Golongan II/b : - orang
- k. Golongan II/a : - orang
- l. Golongan I/b : - orang
- m. Tenaga Kontrak : 19 orang

2) Berdasarkan Pendidikan Formal :

- a. Pasca Sarjana : 3 orang
- b. Sarjana S1 : 6 orang
- c. D3 : 4 orang
- d. SLTA : 2 orang
- e. SLTP : - orang
- f. SD : - orang

3) Berdasarkan Pendidikan Penjurusan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjurusan :

- a. Diklatpim Tingkat IV : 1 orang
- b. Diklatpim Tingkat III : 1 orang
- c. Diklatpim Tingkat II : 1 orang

4) Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan struktural :

- a. Esselon IIb : - orang
- b. Esselon III.a : 1 orang
- c. Esselon IIIb : 3 orang
- d. Esselon IVa : 6 orang

5) Berdasarkan Kompetensi :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| a. Pelaksana Adm/Keuangan | : 2 orang |
| b. Operator Komputer | : 6 orang |
| c. Programmer TI | : 1 orang |
| d. Fotografer/Videografer | : - orang |
| e. Operator SIPKD | : 1 orang |

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika SP

2.3.1. Data Infrastruktur

2.3.1.1. Jaringan

- Internet

Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan Speedy Telkom yang menggunakan line kabel baik Main connection dan Backup connection. Koneksi internet tersebut terbagi menjadi 2 bagian :

1. Koneksi Internasional (Global)

Main Connection international menggunakan bandwidth (Speedy sebesar 10 MB dan Backup Connection sebesar 10 MB. Dimana admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

2. Koneksi Domestik Telkom drive (IV)

Main Connection domestic memiliki bandwidth/throughput yang lebih besar dari koneksi international yaitu sebesar 10 MB dan Backup Connection sebesar 10 MB. Jalur ini dapat pula diakses/dilihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup kompleks kota. Layanan internet ini juga terfilter oleh firewall sehingga para pengguna internet dapat termonitoring. Besaran kapasitas bandwidth layanan internet ini kecenderungannya mengalami kenaikan tiap tahun disesuaikan dengan bertambahnya jumlah user aparatur pemerintah yang mengakses internet

- Intranet (Fiber Optik / Kabel Serat Optik)

Jalur intranet yang terdapat di lingkungan kompleks kota telah terkoneksi dengan menggunakan jaringan Fiber Optic (kabel serat

fiber). Jalur intranet ini digunakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengakses Sistem Informasi. Sistem Informatika SP yang terdapat di Dinas yaitu Mail Server dan Web Server, sedangkan aplikasi atau sistem informasi yang terdapat di luar Dinas Komunikasi Informatika SP juga dapat diakses oleh seluruh OPD yang terdapat dilingkungan Balaikota. Aplikasi-aplikasi yang berjalan dijalar intranet diantaranya adalah SIMKD (Sistem informasi keuangan daerah), LPSE (layanan pengadaan secara elektronik).

- **Perangkat Keras** (Acces Point, Router, Switch Hub, Network Tools Kit Dll).

1. Access Point

Rencana Access point dipergunakan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menjangkau pc komputer atau Notebook yang memiliki wireless. Access point terletak dilokasi kompleks kota dan dilapangan alun-alun kota dimana menjadi layanan untuk publik

2. Router

Dinas komunikasi Informatika SP belum memiliki Router yang mana perangkat ini menghubungkan ke penyedia layanan internet. Router memiliki konfigurasi-konfigurasi yang berisi IP Address koneksi internet.

Router memiliki fungsi yang penting dikarenakan perangkat ini dapat meneruskan paket data yang dapat dinikmati dengan nama Internet.

3. Switch HUB

Rencana Switch merupakan perangkat dengan menggunakan layer 2 dan 3. Perangkat ini memiliki peranan yang penting dalam jaringan di Dinas Komunikasi Informatika SP. Perangkat Switch Layer 3 menangani pembagian VLAN dan juga pemberian distribusi Dynamic IP atau yang lebih dikenal DHCP. Vlan tersebut mendistribusikan IP Address yang berbeda-beda setiap lantainya dan telah memiliki inter koneksi antar vlan, dimana IP Address dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain.

4. Network Tool Kit

Rencana Tang Cramping Tool, kabel tester, cable UTP dan Konektor RG45 merupakan network toolkit yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika SP. Network Tool Kit ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menangani kendala-kendala yang terdapat didalam sebuah jaringan khususnya jaringan fisik.

Tang Cramping berfungsi sebagai penjepit konektor RG45 dan kabel UTP. Ada 2 jenis katagori jenis kabel yang kita kenal di jaringan computer yaitu Kabel Straight dan Kabel Cross over. Kedua jenis katagori kabel tersebut dapat dilakukan pengetesan dengan kabel tester, apakah kabel tersebut layak atau tidak dipergunakan.

2.3.1.2. Hardware

- **Server**

Dinas komunikasi informatika SP belum mempunyai server yang dipergunakan sebagai mail server, web server. Semua server menggunakan system operasi open source dan menggunakan IP Address Public, dimana semua server nantinya dapat diremote dari luar.

Mail server menangani khusus E-mail yang mana dapat diakses dan diberikan secara Cuma-Cuma dengan hanya mendaftarkan akun email. Web server menangani khusus situs pemerintahan kabupaten, dengan domain www.kabmurungraya.go.id. Situs Pemerintah Murung Raya ataupun situs OPD yang terintegrasi dengan domain induk memberikan informasi kepada masyarakat Murung Raya yang menginginkan informasi secara cepat. Situs Pemerintah Murung Raya dapat diakses dari telepon genggam sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi.

- **Perangkat Komunikasi**

Perencanaan Repeater HT Icom IC-FR3000 dan Handy Talky (HT) ICOM IC-V8

Kedua alat ini juga digunakan untuk mempermudah komunikasi antar aparatur pegawai diskominfo terutama pada saat penyelesaian pekerjaan instalasi/konfigurasi jaringan network atau operasional lainnya.

- **Radio** (Pemancar,)

Radio merupakan sarana telekomunikasi yang murah dan terjangkau keseluruh warga. Murung Raya telah memiliki 1 Studio Radio Siaran dan berbagai sarana penunjang lainnya untuk dipakai sebagai sarana siaran seperti SMURA FM Channal 10.92 HZ.

2.3.2 Data Multimedia

- **Kamera** (Kamera Saku, Aksesories)

Untuk mendukung kegiatan peliputan, diskominfo SP menggunakan kamera. Kamera tersebut terdiri dari 1 bagian beserta asesorisnya yaitu :

1. Kamera Saku

Kamera saku ada 1 buah yaitu Sony DSC 980 dan Panasonic Fx1FX-

1. Kamera SLR

Kamera SLR ada 4 buah yaitu Kamera SLR (Double Lens) tipe Olympus E620, Camera Video Type SLR Canon EOS 5D, dan dua buah Kamera SLR Canon EOS 60 D Body Only

2. Asesoris

- a. Lensa kamera tipe Lensa 18-55 mm f/3.5-5.6 dan Lensa 50 mm f/1.4
- b. Memory card ada 8 buah
- c. Charger dan kabel data masing-masing kamera

2.3.3. Data Pendukung Administrasi

- **Personal Computer**

Dinas Komunikasi dan Informasi berawal dari Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika, pada tahun 2008 mendapatkan bagian barang inventaris berupa

- Personal Computer Pentium 4 sebanyak 5 Unit

- Personal Computer merk Acer sebanyak 1 Unit

Pada tahun 2009 pada kegiatan Pengadaan Barang Inventaris dianggarkan untuk

- Personal Computer sebanyak 5 Unit dengan Merk/Type CPU : HP Compaq/dx2310 dan monitor HP L1710.
- Home Multimedia PC Merk/Type : Lenovo Idea Centre A600 sebanyak 4 unit
- PC Built-Up Merk/Type : Lenovo Idea Centre K220 sebanyak 6 Unit
- CPU Merk/Type : Intel E7500 dan Monitor Merk/Type : Samsung 933SN sebanyak 6 unit.

Dan pada tahun 2010 dianggarkan kembali :

- PC Unit Minimal Dual Core sebanyak 5 Unit
- PC Video Editing sebanyak 1 Unit

- **Televisi**

Pada tahun 2017 pembelian

- Televisi Merk/Type : Samsung/Flat FU 48 Inc sebanyak 1 Unit

- **NOTEBOOK/LAPTOP**

Tahun 2015 :

- Note Book Merk/Type Lenovo sebanyak 1 unit

- **PRINTER**

Tahun 2014

- Printer Merk/Type : HP 3940 sebanyak 1 unit
- Printer Dot Matrik Epson Lx 300 sebanyak 1 unit
- Printer HP Laserjet 1020 sebanyak 1 unit
- Printer Inkjet colour Merk/Type : Canon Pixma IP 3680 sebanyak 1 unit

- **SCANNER**

Pembelian Tahun 2015

- Scanner Merk/Type : Fujitsu fi-5015C sebanyak 1 unit

- **MEJA**

Pembelian Tahun 2014

- Meja Kerja Pejabat Ess. II Merk Glory Royal sebanyak 1 unit

- Meja Kerja Pejabat Ess III Merk Glory One sebanyak 3 unit
- Meja Kerja Staff Merk Glory One sebanyak 12 unit

- KURSI

Pembelian Tahun 2012

- Kursi Tamu di ruangan Pejabat Ess. II Merk Ligna/Ivori 311 sebanyak 1 set
- Kursi Kerja Pejabat Ess. II Merk Fantoni sebanyak 1 Unit
- Kursi Kerja Pejabat Ess. III Merk Fantoni sebanyak 3 unit
- Kursi Kerja sebanyak 5 unit
- Kursi Lipat sebanyak 20 unit

- LEMARI

Pembelian Tahun 2012

- Lemari Arsip Merk Brother B-203 sebanyak 2 unit

- FILLING KABINET

Tahun 2010

- Filling Kabinet sebanyak 1 unit

2.3.4 Data Produk Layanan

2.3.4.1 Teknologi Informasi

- Website

Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola dinas komunikasi dan informasi adalah portal pemerintah kabupaten dan portal dinas komunikasi dan informasi sendiri www.kabmurungraya.go.id. Selain itu portal OPD yang lain juga terintegrasi dengan portal pemerintah kabupaten di www.kabmurungraya.go.id. Dimana nantinya Masyarakat dapat menggunakan website untuk menikmati layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online.

- **Call Center**

Rencana Call center merupakan layanan pengaduan yang bisa melayani masyarakat yang akan mengadu ataupun menginformasikan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, infrastruktur ataupun potensi local. Media yang digunakan call center antara lain email, line telepon, dan lewat jejaring sosial seperti twitter, facebook dan yahoo

- **Hotspot**

Rencana Titik point Hot spot yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika SP hanya pada area Komplek Perkantoran Pemda dan Alun-alun jorih jerah. Masyarakat dapat menggunakan hotspot dan menikmati layanan internet dengan cuma-cuma.

2.3.4.2 Diseminasi Informasi

- **Majalah**

Majalah Warta Mura sebelumnya diterbitkan oleh Bagian Humas Setda Murung Raya. Setelah Dinas Komunikasi Informatika SP berdiri pada tahun 2018 Majalah Warta Mura akan direncanakan dan dikelola oleh Seksi Info Publik Dinas Komunikasi Informatika SP

- **BALIHO (JUDUL BALIHO)**

Pada kurun waktu dari tahun ketahun Diskominfo berencana menginformasikan program pembangunan dan even-even tertentu seperti informasi pemilukada, informasi pelaksanaan sensus penduduk, peringatan hari-hari besar nasional disertai himbauan, himbauan untuk melaksanakan PHBS, Himbauan penggunaan produksi lokal, informasi e-KTP, melalui media luar ruang, baliho berukuran 5 x 10 meter per segi yang terletak di billboard pertigaan dll.

2.3.5.3 TELEKOMUNIKASI

- **MENARA**

Berdasarkan hasil survey tahun 2013, jumlah menara dan BTS yang ada di Murung Raya adalah sebanyak 41 BTS yang terletak pada 41 menara telekomunikasi. yaitu :

1. Telkomsel
2. Indosat
3. XL Axiataindo

41 BTS dari 6 Telco Operator ini adalah untuk melayani 9.660 penduduk pada tahun 2013 yang tersebar pada area seluas wilayah Murung Raya adalah 14,729 Km².

Idealnya 1 BTS dengan 3 sektor antenna dan 4 kanal di setiap sector mampu meng-handle trafik telekomunikasi hingga 1.000 pengguna selular dengan asumsi grade of service (tingkat kegagalan panggil) adalah 2% dan rata-rata pendudukan kanal per pelanggan selular per hari adalah 50 mili erlang/hari (setara dengan pendudukan jaringan komunikasi selular selama 3 menit). Dengan demikian kontribusi 531 BTS di Murung Raya saat ini adalah mampu melayani sebanyak 531 BTS x 1.000 pengguna selular = 531.000 pelanggan selular.

Pada tahun-tahun ke depan hingga 5 tahun, dengan terdiversifikasi-nya layanan selular dari layanan

Hal ini berakibat adalah polusi pandangan dan menciptakan hutan menara di setiap tempat yang tidak hanya di Kota-kota besar voice, layanan data, layanan video hingga high speed data yang memungkinkan adanya layanan digital vidoe broadcast, video conference. Didukung oleh semakin turunnya biaya komunikasi selular (akibat adanya kompetisi antar 10 operator selular), maka sangat mungkin teledensity telepon selular akan tumbuh, bukan hanya karena bertambahnya pelanggan selular, namun juga meningkatnya trafik telekomunikasi. Konsekuensi dari hal ini semua adalah akan semakin bertambahnya BTS-BTS dan menara-menara

telekomunikasi di seluruh Indonesia termasuk di Kota Puruk Cahu, namun akan masuk ke area-area Kota Kabupaten dan Kecamatan.

Ketika belum ada kesadaran untuk merencanakan, mengendalikan, menata menara-menara tersebut, maka dapat terjadi dalam 5 tahun ke depan jumlah menara yang di Murung Raya akan meningkat tanpa kendali. Menghentikan pembangunan menara telekomunikasi akan berakibat pada penurunan kualitas layanan telekomunikasi dan menghambat tumbuhnya bisnis telekomunikasi di Kota Puruk Cahu, karena bertambahnya pengguna selular tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas trafik selular.

Oleh karena itu dengan dilaksanakannya konsep dan implementasi Menara Bersama memungkinkan untuk mengendalikan pertumbuhan menara di Murung Raya dengan tetap mempertahankan kualitas layanan selular hingga menjadi 50 zona tata ruang persebaran menara bersama dalam tempo 5 tahun ke depan (tahun 2018). 9 zona ini diharapkan mampu mendukung tumbuhnya BTS dari 41 BTS yang ada saat ini.

- POS / JASA TITIPAN

Sampai dengan saat ini penyelenggara Pos / Jasa Titipan di Murung Rayadilaksanakan oleh 5 (lima) penyelenggara pos/jasa titipan yaitu:

1. PT. POS Indonesia
2. PT. Titipan Kilat
3. JNE
4. TIKI
5. Pandu Logistik

Dari lima penyelenggara jasa titipan ada 1 kantor cabang . Penyelenggaraan Pos . Selama Dinas Komunikasi dan Informasi Murung Rayaberdiri , belum sekalipun mengeluarkan ijin Kantor Agen penyelenggaraan Jasa Pos /Jasa titipan dan mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian kantor kantor cabang maupun pusat dari penyelenggaraan jasa Pos/jasa titipan.

Tabel . Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas

		Target	Realisasi	Rasio
--	--	--------	-----------	-------

No	Indikator Kinerja Tupoksi	2018 s/d 2022	2018 s/d 2022	Capaian
	Majalah Warta Mura	10.000 Eks	80%	
	Buku	5.000 Eks	100%	
	Compact Disc	2 CD	100%	
	Baliho	38 Tema	100%	
	Spanduk	149 Buah	100%	
	Leaflet	5.000 lbr	100%	
	Banner	165 buah	100%	
	Poster	160 lbr	100%	
	Sticker	10.000 lbr	100%	

Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi Murung Raya Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel . Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Uraian	Anggaran Th.2017 s/d 2022	Realisasi Anggaran Th. 2017 s/d 2022	Rasio Capaian (%)	Rata2 Pertumbuhan (Anggaran dan Realisasi)
Pendanaan	4 - 15 Milyard			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 CYBER CITY

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia selalu berjalan dari masa ke masa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*). Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era cyber city, yang

melibatkan sektor pemerintah (*government*) selaku fasilitator, sektor publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas (*business*) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi didalam cyber city merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecil Menengah), perhubungan dan perizinan. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan komunitas TIK. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

A. Korelasi antara pemerintah (*government*), business (komunitas) dan citizen (publik) di dalam Implementasi cyber city antara lain :

1. Government to Government (Hubungan pemerintah dengan lembaga pemerintah)
 - a. Menyediakan fasilitas jaringan interkoneksi antar lembaga pemerintah, untuk mempercepat pertukaran data
 - b. Menyediakan sistem aplikasi *e-government* untuk layanan masyarakat.
 - c. Menyediakan layanan *content* untuk layanan informasi bagi masyarakat.
2. Government to bussines (Hubungan pemerintah dengan komunitas)
 - a. Melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas TIK sebagai industri kreatif TIK untuk bersama-sama melakukan inovasi layanan masyarakat.
 - b. Pemerintah memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya bagi komunitas TIK untuk pengembangan diri dan menciptakan produk-produk layanan publik berbasis TIK.
 - c. Pemerintah bersama komunitas TIK menumbuhkembangkan potensi daerah menuju masyarakat yang lebih maju dan meningkatkan daya saing kota depok.

3. Government to citizen (Hubungan pemerintah dengan masyarakat)
 - a. Pemerintah menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara responsif bagi masyarakat, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
 - b. Pemerintah menyediakan aplikasi layanan publik berbasis TIK, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan sektor lainnya.

B. Cyber City dalam Bidang Kependudukan

1. Penerapan KTP Nasional yang terintegrasi untuk mensukseskan program Nasional yaitu 'Single Identity', layanan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.
2. Kolaborasi dengan institusi vertikal dan lembaga, untuk menciptakan kemudahan *interoperability* dalam pertukaran data kependudukan, seperti puskesmas, rumah sakit, bank, sekolah, universitas, kantor imigrasi dan lain sebagainya.

C. Cyber City dalam Bidang Pendidikan

1. Pengayaan *content digital* berbasis pengetahuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat yang mudah diakses melalui berbagai sarana seperti WiFi (*Hotspot*), telepon selular dan sarana komunikasi lainnya.
2. Penyediaan sistem 'Penerimaan Siswa Baru secara OnLine' dan sistem informasi sekolah untuk kemudahan informasi bagi masyarakat terutama orangtua siswa.
3. Layanan pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh (*distance learning*) untuk memberikan kemudahan dalam bentuk diskusi/kelas online, konsultasi online dan pustaka digital.
4. Terjadi *sharing resource* (berbagi sumber daya, berbagi hasil penelitian) antar lembaga pendidikan /pelatihan, perpustakaan digital dan instrumen pendidikan lainnya.
5. Penggunaan perangkat informasi interaktif berbasis multimedia, seperti mata pelajaran berbasis multimedia yang secara bertahap menggantikan papan tulis, untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa.

D. Cyber City dalam Bidang Kesehatan

1. Kolaborasi dan integrasi dengan data kependudukan untuk memperoleh data warga tidak mampu, sebagai landasan untuk pemrosesan layanan jamkesda.
2. Tersedia interkoneksi dengan apotik dan rumah sakit untuk kemudahan layanan kesehatan dan obat-obatan.

E. Cyber City dalam bidang Tenaga Kerja dan Sosial

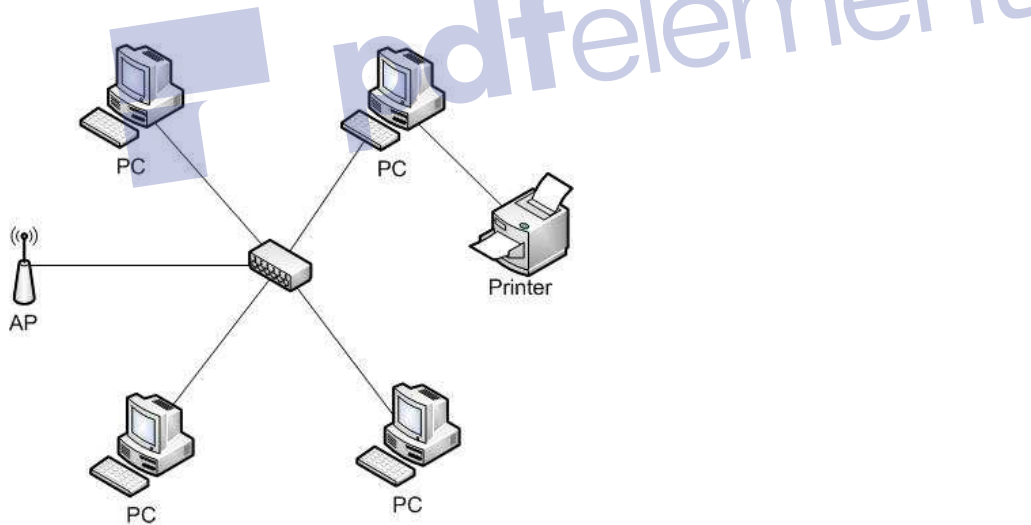
1. Menyediakan layanan tenaga kerja online yang terintegrasi dengan data kependudukan.

2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat setempat dengan tersedianya pengetahuan kewirausahaan secara digital.

2.4.2 INFRASTRUKTUR

Dalam perancangan dan pengembangan jaringan, Pemerintah Murung Raya akan membangun fasilitas Local Area Network (LAN) di semua institusi Pemerintahan. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu instansi yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling bertukar informasi.

Topologi yang akan digunakan pada masing-masing dinas atau instansi pada Pemerintahan Murung Raya adalah Star. Karena sangat sesuai diterapkan untuk melakukan efisiensi dan kinerja jaringan secara keseluruhan tidak akan terganggu jika ada satu komputer yang *error/crash*. Selain itu juga karena adanya control terpusat sehingga memudahkan dalam mendeteksi *error* dan adanya upaya penghematan sumber daya yang ada, terutama penggunaan printer bisa dioptimalkan semaksimal mungkin.

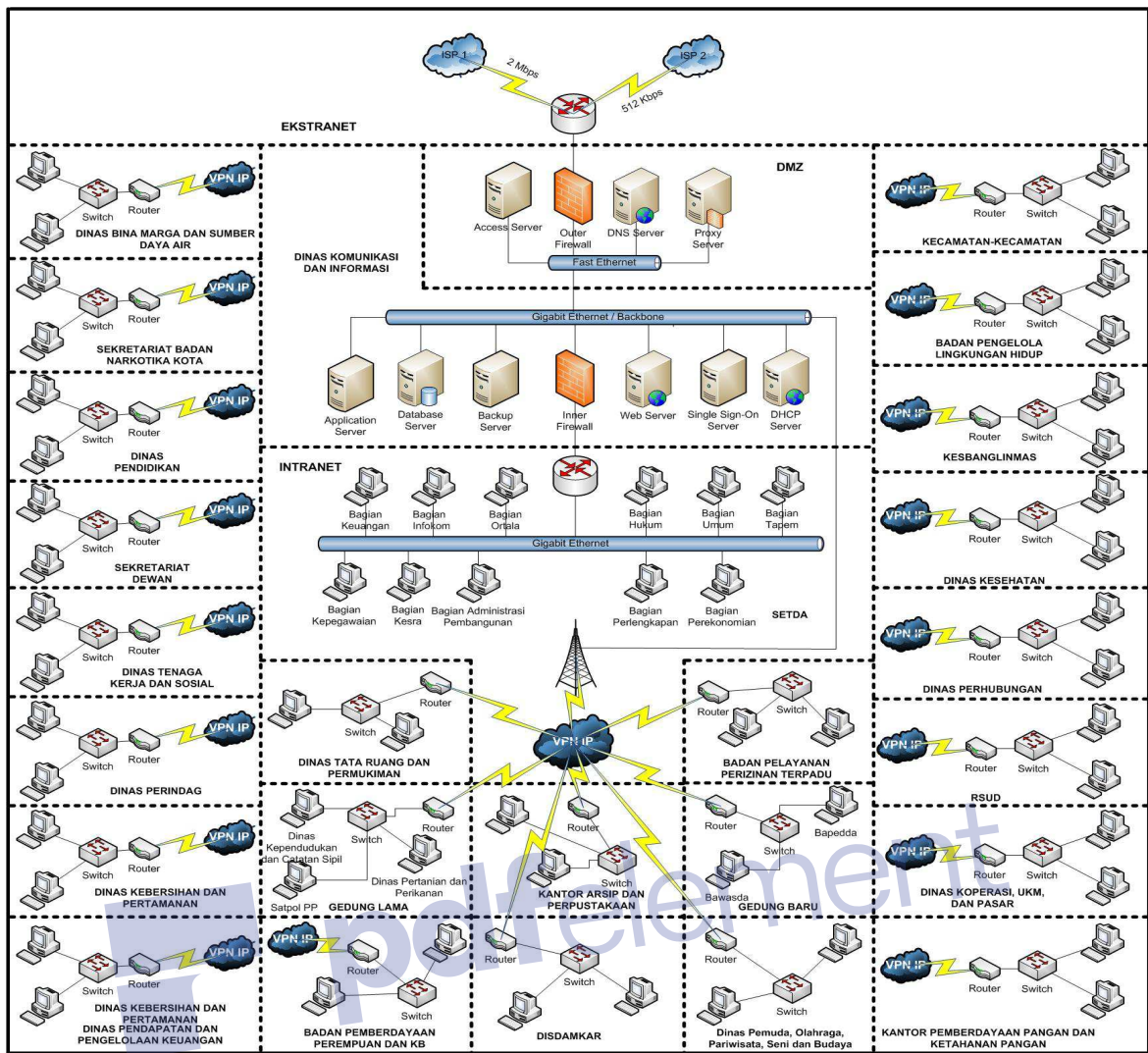


Gambar 1 Struktur Umum Jaringan pada Dinas/Instansi

2.4.2.1 Arsitektur Infrastruktur TI

Topologi dan Desain Jaringan

Untuk mendukung berjalannya aplikasi yang akan diterapkan di Pemerintah Kabupaten Murugn Raya, maka diperlukan infrastruktur sebagai berikut :



Gambar 2 Rencana Topologi Ideal Pemkab Mura

Dari ilustrasi di atas, dapat dijelaskan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Murung Raya menjadi beberapa bagian, yaitu :

- Extranet

Yaitu jaringan yang terdapat di luar jaringan Pemerintah Murung Raya dimana fungsinya adalah untuk memfasilitasi para pengguna yang ingin mengakses informasi melalui internet. Jaringan ini diperuntukkan bagi layanan publik yang dikelola oleh Dinas Kominf SP berupa penyediaan portal yang aman dan tersegmentasi untuk berbagai pengguna dari berbagai kalangan, baik itu pengguna internal dari kalangan pegawai Pemerintah Murung Raya maupun pengguna dari luar seperti masyarakat umum.

Pemerintah Murung Raya diharapkan mampu memiliki as number ip publik yang tetap dikarenakan kebutuhan terhadap layanan aplikasi publik.

- Intranet

Yaitu jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Murung Raya untuk keperluan internal. Jaringan ini akan menopang arus informasi antar institusi Pemerintahan melalui tukar menukar data serta *file sharing* dari/men menuju gudang data (*data warehouse*). Secara lokasi, dapat dibedakan menjadi :

- Pemkab

Jaringan diperuntukkan bagi institusi pemerintahan yang berada di sekitar komplek Pemkab, seperti Setda, Diskominfo, Dinas Pendidikan, Inspektorat BPKAD, Badan Pendatan Daerah, Bapedda, dan lain-lain.

- Luar Pemkab

Jaringan diperuntukkan bagi institusi pemerintahan yang berada di luar komplek Pemkab, seperti, Sekretariat Dewan, dan lain-lain.

Perlu dilakukan penyempurnaan pembangunan jaringan *backbone* sebagai tulang punggung lalu lintas data antar SKPD mengingat kebutuhan akan informasi data yang semakin meningkat. Pola pembangunan *backbone* dilakukan dengan mengelompokkan SKPD yang berdekatan. SKPD-SKPD tersebut disatukan dengan jaringan UTP yang mungkin akan ditambah dengan repeater atau langsung dengan pembangunan jaringan Fiber Optik. Kemudian dipasang tower untuk berkomunikasi dengan NOC.

Penyempurnaan tersebut dimulai dari NOC (Network Operation Center) itu sendiri sebagai pelaksana pengaturan lalu lintas data, yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai penanggung jawab utama.

- DMZ

Demilitarized Zone (DMZ) merupakan pintu gerbang terhadap jaringan luar (internet) yang berfungsi untuk mengamankan Intranet terhadap serangan dari luar. Computer-komputer pada jaringan DMZ merupakan komputer-komputer yang perlu dihubungi secara langsung oleh pihak luar. Contohnya adalah *access server*, *Proxy Server*, dan lain-lain.

Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada host dalam jaringan DMZ harus dikategorikan sebagai aplikasi yang aman, dipantau dan di-*update* secara regular. Aturan-aturan yang melekat pada DMZ yaitu :

- Pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host yang berada pada jaringan DMZ saja dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Secara *default*, pihak luar tidak bisa melakukan hubungan secara langsung dengan host pada jaringan DMZ.
- Host pada jaringan DMZ secara *default* tidak dapat berhubungan dengan host pada jaringan internal. Koneksi secara terbatas dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- Host pada jaringan internal dapat melakukan koneksi secara bebas baik ke jaringan luar maupun ke jaringan DMZ. Pada beberapa implementasi khusus, untuk meningkatkan keamanan, host pada jaringan internal tidak dapat melakukan koneksi ke jaringan luar, melainkan melalui perantara host pada jaringan DMZ, sehingga pihak luar tidak mengetahui keberadaan host pada jaringan internal.

Pada gateway diberikan fasilitas VPN (Virtual Private Network) untuk menjaga kerahasiaan pengiriman data baik voice maupun non voice dari dan ke luar jaringan Pemerintahan Murung Raya sedangkan dari sisi komputer klien diberi software VPN Client.

Server Farm berisi server-server seperti Application Server, Database Server, Backup Server, Single Sign On Server, dan lain-lain.

2.5.2.2 Instalasi Jaringan

Pengembangan infrastruktur jaringan akan dimulai dari pembangunan infrastruktur jaringan di lingkup NOC sebagai pusat kontrol dan monitor networking. Pembangunan ini meliputi pemasangan wire LAN dan wireless LAN yang mampu menghubungkan NOC dengan SKPD lainnya.

Setelah itu, pengembangan dan pembangunan infrastruktur di luar NOC. Hal ini didasari pada kondisi topografi Murung Raya dimana jarak harus diukur secara presisi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya. Analisis pengembangan dilakukan untuk mendapatkan beberapa persyaratan komponen jaringan agar

dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan koneksi jaringan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, harus dilakukan analisis awal kebutuhan pemasangan dan pengembangan koneksi jaringan.

2.4.2. DATA DAN INFORMASI

Pemerintah Murung Raya menekankan pertukaran data dan informasi dengan pemerintah, komunitas dan masyarakat. Dalam penyajian data dan informasi, Pemerintah Murung Raya akan mendorong semua institusi OPD yang ada di Pemerintah Murung Raya untuk memiliki website opd yang dikelola dan dikembangkan sendiri oleh dinas tersebut dan terintegrasi dengan portal pemkab. Dalam pelaksanaannya, masing-masing portal OPD itu harus menyediakan layanan pengaduan online.

Pertukaran data dan informasi antara pemerintah dengan pemerintah (G2G) untuk menunjang pelaksanaan PPID, Pemerintah dengan komunitas ditekankan peranan komunitas dalam membantu pemerintah sebagai mitra pemerintah. Komunitas didorong untuk menghimpun data, pengadaan sistem aplikasi yang bisa dipakai pemerintah dalam meningkatkan layanan, menumbuhkan industri kreatif dan UKM.

Selain itu peranan masyarakat dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam mensosialisasikan program pemerintah dan membantu pemerintah menginformasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi pemerintah. Dinas komunikasi dan informasi sebagai gate way atau jembatan akan menjembatani pertukaran data dan informasi antara Pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan komunitas dan juga pemerintah dengan masyarakat.

Data dan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Murung Raya untuk keperluan internal dan eksternal. Data dan informasi ini akan menopang arus informasi antar institusi Pemerintahan melalui tukar menukar data serta *file sharing* dari/menuju gudang data (*data warehouse*).

2.5.3 DISEMINASI INFORMASI PUBLIK

Di masa depan direncanakan peningkatan kualitas pelayanan informasi dan peningkatan kemitraan dengan lembaga terkait, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyampaian informasi yang diimplementasikan ke dalam beberapa

kegiatan. Mengingat usia Dinas Komunikasi Informatika SP baru satu tahun berdiri maka penambahan fasilitas penyebaran informasi mutlak dibutuhkan, Media Center sebagai suatu ruangan yang berisi meja informasi, papan informasi, komputer dan kelengkapannya, jaringan internet, serta media-media informasi dalam ruangan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi pembangunan kepada masyarakat. Sedangkan Pembuatan library teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menghimpun dokumentasi foto, film, media informasi cetak yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi.

Mengingat penetrasi internet dalam kehidupan masyarakat di Murung Raya mencapai 20% Dinas Kominfo SP merasa perlu meningkatkan akses informasi positif dan meminimalkan akses konten negatif. Sebagai solusi untuk peningkatan akses informasi maka akan diselenggarakan lomba multimedia berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sosialisasi informasi sehat ke sekolah-sekolah, warnet dan media serta penyusunan informasi sehat.

Selain itu untuk memberdayakan masyarakat dalam penyebaran informasi partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan. Proses akses informasi pembangunan akan menjadi bagian dari peran serta masyarakat, yakni melalui pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) dan pembinaannya. Target penyampaian informasi akan terlaksana dengan baik dengan penyuluhan dari masyarakat untuk masyarakat.

Penyebaran informasi juga tidak akan terlepas dari peran media massa. Kemitraan dengan media massa dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis sehingga media massa dapat dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi yang efektif. Konferensi pers dan artikel tentang pembangunan diharapkan dapat mengimbangi isu-isu negatif yang dibentuk oleh media massa. Media massa harus terus diinformasikan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, sehingga berita yang dihasilkan dapat memberi efek positif bagi pembacanya.

2.5.4 TELEKOMUNIKASI POS DLL

Penyelenggaraan Pos/jasa titipan yang ada di Murung Raya yang pastinya akan terus berkembang karena penambahan jumlah penduduk Murung Raya

yang pesat. Perkembangan pelayanan jasa pos ini harus terus dikendalikan agar potensi penyelenggaraan pos yang selama ini belum nampak jelas dalam pengendalian oleh dinas Kominfo SP dapat dioptimalkan. Salah satu harapan pemerintah daerah yang telah bertekad mewujudkan Murug Raya sebagai kota yang maju maka penyelenggaraan pos/jasa titipan harus lebih maju. Ciri dari kemajuan penyelenggaraan pos/jasa titipan adalah kemudahan dalam memanfaatkan jasa ini, jaminan dari penyelenggara atas keamanan barang yang dikirim dan cepat sampai tujuan.

Disamping penyelenggaraan jasa Pos /jasa titipan yang memang sangat penting diperhatikan pemerintah, penyelenggaraan Telekomunikasi pun sangat penting dioptimalkan karena salah satu ciri dari majunya sebuah kota adalah lancarnya komunikasi. Warga Murung Raya diharapkan dapat bersikap dewasa dengan adanya kelancaran dalam telekomunikasi. Kelancaran telekomunikasi tak lepas dari tersedianya infrastruktur dan sarana telekomunikasi yang memadai. Salah satu infrastruktur yang digunakan dalam memenuhi ketersediaan akses telekomunikasi adalah menara dan fiber optik. Kondisi kedepan yang diharapkan dalam penyelenggaraan telekomunikasi adalah kemudahan warga dalam mengakses informasi dan mudah dalam berkomunikasi secara lancar. Untuk tetap terjaga ketersediaan akses informasi menggunakan telpon selular maka pengendalian menara dan pengawasan dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan peta digital postel Murung Raya harus diadakan dimasa yang akan datang.

Sarana lain dalam berkomunikasi disamping menggunakan telepon, surat atau internet maka ada sarana komunikasi dan mencari informasi yang murah dan mudah diakses yaitu sarana Radio. Radio amatir, Radio komunitas maupun Radio penyiaran dapat dijadikan sarana komunikasi sekaligus sarana penyebaran informasi yang murah dan mudah. Oleh karena itu ke Depan penyelenggara siaran Radio di Murung Raya diberikan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya dalam memberikan informasi dan memainkan peran sebagai fasilitator dalam kelancaran komunikasi antar warga dan warga dengan pemerintah dan peran aktif membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pemerintah.

Penyelenggaraan siaran Radio yang ada di Puruk Cahu hanya ada satu yang memiliki ijin penyiaran dari Kementrian Kominfo. Pemerintah Murung Raya

telah berusaha menyelenggarakan penyiaran Radio Publik namun dikarenakan belum memiliki LPPL maka penyelenggaraan dialihkan sementara waktu menggunakan Radio uji coba.

penyiaran Radio akan dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan menggunakan :

1. Radio streaming
2. Kerja sama dengan RRI
3. Mengembangkan pemakaian radio digital.

Disamping Radio, ada sarana lain untuk menyebarkan informasi dan alat berkomunikasi masal yaitu Televisi Silva Chanel. Hanya ada satu TV yang sudah bersiaran disamping TV komunitas lain yang masih tahap proses perijinan di Kota Puruk Cahu. Oleh karenanya ke depan diharapkan adanya peran serta aktif penyelenggara TV dalam menyebarkan informasi yang mendidik di Kota Puruk Cahu.

Untuk meminimalisir dampak negatif dari penyiaran TV maka Murung Raya diharapkan ke depan:

1. Mengawasi seluruh penyiaran Televisi yang tertangkap oleh warga Puruk Cahuk dan memberikan laporan kepada KPID jika ada penyelenggaraan penyiaran yang tidak memenuhi keamanan atas anak.
2. Dengan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran publik yang akan dibentuk untuk mengisi isi siaran yang layak bagi keamanan anak.